



PENGARUH SEKTOR BASIS NON PARIWISATA, PENDIDIKAN DAN UMK TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI BALI

Seli Indah Dela Puspitasari¹ I Wayan Priyana Agus Sudharma²

Article history:

Submitted: 13 April 2025

Revised: 10 Juli 2025

Accepted: 1 September 2025

Keywords:

City Minimum Wage (UMK);

Education;

Labor Absorption;

Non-Tourism Base Sector.

Abstract

Economic diversification is becoming increasingly important in ensuring regional stability, especially in areas that are highly dependent on a single economic sector. This study employs a quantitative method using panel data analysis techniques and the Dynamic Location Quotient (DLQ) approach to identify nontourism base sectors in the nine regencies/cities of Bali Province during the 2015–2024 period. The analysis results indicate that there are four (4) nontourism base sectors: the agriculture, forestry, and fisheries sector; the manufacturing sector; the transportation and warehousing sector; and the information and communication sector. Simultaneously, the agriculture, forestry, and fisheries sector; the manufacturing sector; the transportation and warehousing sector; the information and communication sector; education; and the minimum wage (UMK) have a positive and significant effect on employment absorption in Bali Province during 2015–2024. Partially, the agriculture, forestry, and fisheries sector ($X_{1\ 1}$) and the manufacturing sector ($X_{1\ 2}$) have a positive and significant effect on employment absorption. Meanwhile, the information and communication sector ($X_{1\ 4}$) and education (X_2) have a negative and significant effect on employment absorption in Bali Province. The transportation and warehousing sector ($X_{1\ 3}$) and the minimum wage (X_3) have a positive but not significant effect on employment absorption in Bali Province

Kata Kunci:

Pendidikan;

Penyerapan Tenaga Kerja;

Sektor Basis Non pariwisata;

Upah Minimum;

Kabupaten/Kota (UMK).

Abstrak

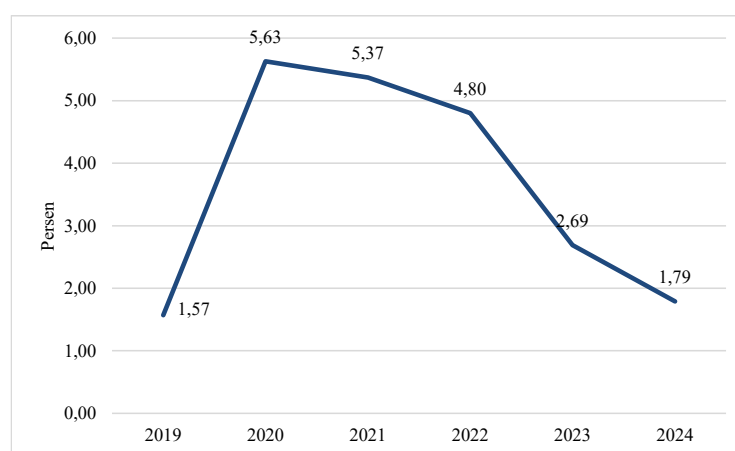
Diversifikasi ekonomi semakin penting dalam memastikan stabilitas regional, terutama di daerah yang sangat bergantung pada satu sektor ekonomi saja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data panel dan pendekatan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) untuk mengidentifikasi sektor basis nonpariwisata di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2015-2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat empat sektor basis nonpariwisata yaitu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan; sektor industri pengolahan; sektor transportasi dan pergudangan; sektor informasi dan komunikasi. Secara simultan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan; sektor industri pengolahan; sektor transportasi dan pergudangan; sektor informasi dan komunikasi, pendidikan, dan UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali Tahun 2015-2024. Secara parsial sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan ($X_{1\ 1}$); sektor industri pengolahan ($X_{1\ 2}$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel sektor informasi dan komunikasi ($X_{1\ 4}$), pendidikan (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, dan sektor transportasi dan pergudangan ($X_{1\ 3}$), UMK (X_3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia²

Email: priyasudharma@unud.ac.id

PENDAHULUAN

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali sangat besar, terutama melalui subsektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman (BPS, 2024d). Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap pariwisata menjadikan Bali rentan terhadap guncangan ekonomi eksternal. Fenomena seperti Bom Bali tahun 2002 dan 2005 serta Pandemi Covid-19 menunjukkan bagaimana ketergantungan ini dapat menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah wisatawan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan melemahnya ekonomi daerah (Pratiwi & Purwanti, 2024). Masalah ketenagakerjaan tersebut timbul akibat penutupan hotel, restoran, dan objek wisata yang memicu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Kondisi ini menunjukkan dengan jelas bahwa sektor pariwisata sangat rentan terhadap gangguan dari faktor eksternal (Purwahita *et al.*, 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2024

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam persen), Tahun 2019 -2024

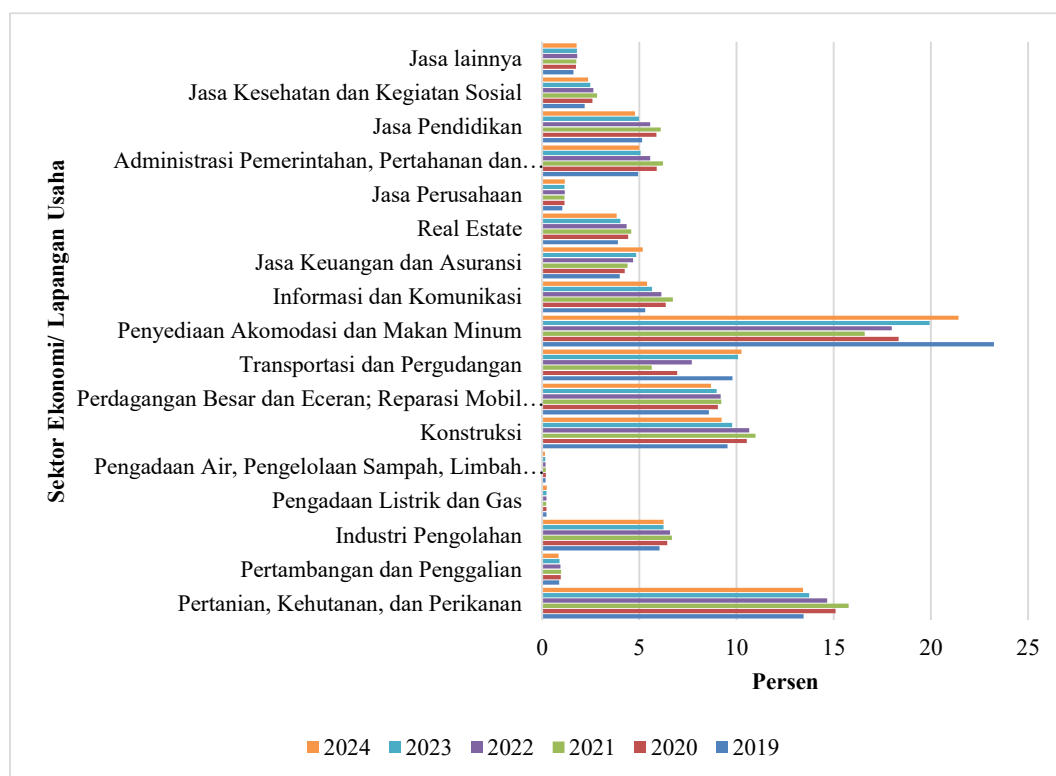
Peningkatan pengangguran akibat PHK tersebut memaksa banyak pekerja untuk beralih pekerjaan. Gambar 1 menunjukkan tahun 2022-2023, pemerintah dan masyarakat mulai bangkit melalui pembukaan kembali sektor pariwisata. Kebangkitan ini terlihat dari turunnya angka pengangguran menjadi 4,8 persen (BPS, 2024d). Pada upaya pemulihan dan percepatan perekonomian setelah Pandemi Covid-19 fokus pemerintah dan investasi cenderung untuk pemulihan sektor pariwisata, seperti pelonggaran pembatasan perjalanan, promosi pariwisata, pengembangan destinasi wisata lokal, peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, dan mulai dilaksanakan acara internasional seperti KTT G20 di Bali (Sudharma, 2023).

Selama Pandemi Covid-19, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan signifikan, dari lebih dari 6 juta kunjungan pada tahun 2019 menjadi hanya sekitar 51 pengunjung pada tahun 2021 (BPS, 2024a). Hal ini berdampak pada sektor pariwisata yang mengalami kontraksi besar, dengan kontribusi terhadap PDRB menurun dari 24 persen menjadi hanya 7 persen (BPS, 2024). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Bali berkontraksi hingga -9,44 persen, dan angka pengangguran meningkat dari 1,57 persen menjadi 5,63 persen pada tahun 2020 (BPS, 2024b).

Dampak fenomena Pandemi Covid-19 mengindikasikan perlunya diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor nonpariwisata untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah (Rotar *et al.*, 2023). Diversifikasi ekonomi menjadi strategi penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap pariwisata dan meningkatkan stabilitas ekonomi di Bali. Beberapa sektor nonpariwisata yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja di antaranya adalah sektor pertanian, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya (Nasution *et al.*, 2020). Sektor industri pengolahan,

misalnya, memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam (Sukirno, 2014).

Menurut Teori John Maynard Keynes, peningkatan permintaan agregat akan mendorong kenaikan output, yang pada akhirnya meningkatkan produksi barang dan jasa serta memperluas kesempatan kerja. Keynes menekankan bahwa pemerintah harus bertindak aktif dalam menciptakan lapangan kerja, terutama ketika sektor swasta tidak mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Kemudian Keynes juga berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) sulit tercapai karena perekonomian sering mengalami kekurangan permintaan agregat. Dalam kondisi ini, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter menjadi penting untuk meningkatkan kesempatan kerja (Ainun *et al.*, 2023:7). Tenaga kerja berperan dalam membentuk konsep pendapatan karena pasokannya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Sementara itu, permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pada peningkatan permintaan terhadap barang jadi, serupa dengan permintaan terhadap barang modal. Sektor basis menjadi kunci penciptaan lapangan kerja dan penopang ekonomi daerah, karena mampu memenuhi kebutuhan lokal dan diekspor ke daerah lain. Peningkatan permintaan eksternal dapat mendorong produksi, meningkatkan pendapatan, dan membuka peluang kerja baru (Pratama & Hidayah, 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2024

Gambar 2. Distribusi PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 (%)

Distribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bagaimana berbagai sektor ekonomi memberikan kontribusi terhadap total output regional. Meskipun pariwisata khususnya sektor penyedia akomodasi makan dan minum tetap menjadi sektor utama dalam perekonomian Bali, pengembangan sektor nonpariwisata dapat menjadi strategi jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan terhadap pariwisata dan meningkatkan stabilitas ekonomi daerah. Dengan demikian, strategi tersebut juga mengoptimalkan potensi sektor lainnya, memperkuat struktur ekonomi Bali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Setiap kabupaten di Provinsi Bali memiliki perbedaan struktur ekonomi tercermin dari kontribusi terhadap PDRB dari masing-masing sektor ekonomi (Pratiwi *et al.*,

2023). Dalam Hukum Okun (Okun's Law) menunjukkan bagaimana perubahan dalam output ekonomi suatu wilayah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. ketika PDRB tumbuh lebih cepat dari tingkat pertumbuhan potensialnya, tingkat pengangguran akan menurun karena peningkatan produksi memerlukan lebih banyak tenaga kerja.

Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya (*hinterland*), dengan mendorong penguatan sektor atau subsektor unggulan sebagai motor penggerak ekonomi serta pemererat keterkaitan ekonomi antarwilayah (Kuncoro, 2014:317-318). Hasil penelitian terdahulu Parastika & Setyowati (2023), Sagita *et al.* (2024) bahwa PDRB sektor basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Temuan penelitian yang berbeda Sakdiyah & Taufiq (2023) menunjukkan bahwa sektor basis memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di Kabupaten Lamongan. Sedangkan hasil penelitian Pratama & Hidayah (2023) sektor basis di Jawa Tengah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

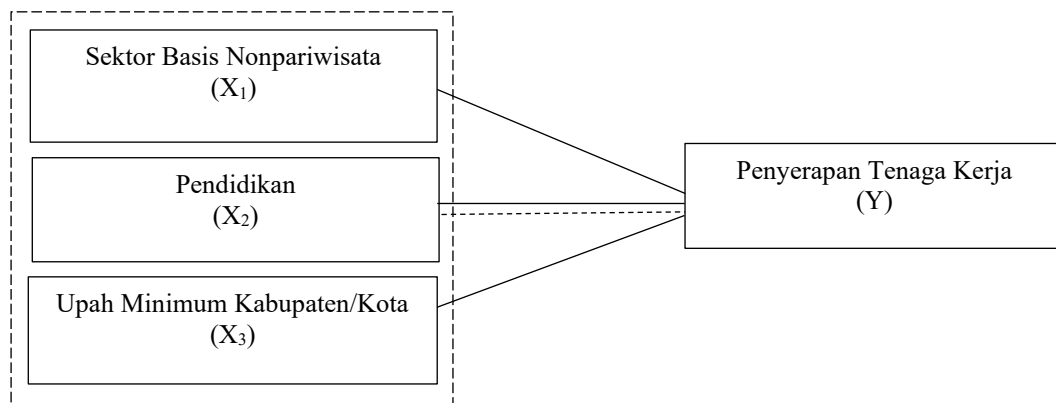
Keberhasilan pembangunan juga diukur dari pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja (Sukirno, 2014:60). Teori *Human Capital*, yang dikembangkan oleh Gary Becker dan Theodore Schultz, menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan sebagai bentuk modal manusia. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang baik akan lebih produktif sehingga lebih mudah diserap oleh pasar kerja dan juga mampu untuk berwirausaha, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja (Hikmawati & Yasa, 2024). Namun, dalam realitanya dunia pendidikan belum mampu menjembatani kebutuhan dunia kerja terkini secara komprehensif. Hal ini pula menjadi penyebab pengangguran terdidik (Ainun *et al.*, 2023:150).

Selanjutnya, Teori Ekonomi Klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menyoroti bahwa keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja menjadi penentu utama tingkat upah di pasar tenaga kerja. Menurut Smith, jika permintaan tenaga kerja meningkat lebih cepat dibandingkan penawarannya, maka upah akan naik. Sebaliknya, jika jumlah pekerja yang mencari pekerjaan lebih banyak dibandingkan permintaan tenaga kerja, maka upah akan cenderung turun. Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan kebijakan untuk memastikan bahwa pekerja menerima gaji minimum yang layak. Semakin besar UMK yang ditetapkan oleh pemerintah, kemungkinan orang akan banyak yang cenderung untuk menawarkan dirinya bekerja. Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tinggi berkontribusi positif dan mendorong penyerapan tenaga kerja (Siatan & Zuliansyah, 2023). Penelitian yang dilakukan Windayana & Darsana (2020) menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Sedangkan hasil penelitian Cengiz *et al.* (2019) bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan tidak menyebabkan pengangguran, tetapi justru meningkatkan pendapatan rata-rata pekerja berupah rendah. Dalam konteks tenaga kerja, tingkat pendidikan dan kebijakan pengupahan juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Pendidikan yang lebih tinggi berperan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja, sementara kebijakan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja (Rahmita *et al.*, 2022).

Fenomena ketenagakerjaan dan perbedaan temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji guna memahami penyerapan tenaga kerja di sektor basis nonpariwisata. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran dalam mengalokasikan dana, sehingga mampu menciptakan keseimbangan yang lebih baik antar sektor ekonomi setiap daerah (Weir-Smith & Dlamini, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor basis nonpariwisata di Provinsi Bali serta menguji pengaruh sektor tersebut, pendidikan, dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi pembangunan ekonomi agar lebih banyak pekerja yang terserap secara signifikan,

terutama di sektor basis nonpariwisata, yang memiliki potensi besar untuk berkembang secara optimal, khususnya di wilayah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Bali.

Berikut kerangka konseptual penelitian ini:



Sumber: Data Penelitian, 2025

Gambar 3. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dan asosiatif. Kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor basis nonpariwisata menggunakan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Dalam penelitian ini sektor pariwisata didefinisikan hanya mencakup sektor penyedia akomodasi, makan, dan minum, karena sektor ini secara langsung mencerminkan aktivitas utama dalam industri pariwisata, seperti hotel, restoran yang melayani wisatawan. Pendekatan ini didasarkan pada karakteristik ekonomi Bali, di mana sektor penyedia akomodasi, dan makan minum merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB dan tenaga kerja dalam industri pariwisata. Selain itu, sektor-sektor lain yang juga terkait dengan pariwisata, seperti transportasi, perdagangan, dan jasa lainnya, sering kali memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi domestik dan nonpariwisata, sehingga sulit untuk mengisolasi dampaknya secara langsung terhadap sektor pariwisata. Dengan membatasi definisi sektor pariwisata hanya pada sektor penyedia akomodasi, dan makan minum, analisis sektor basis nonpariwisata menjadi lebih jelas dan fokus pada sektor-sektor lain yang memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi selain pariwisata.

Pendekatan asosiatif bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel Independen yaitu, sektor basis nonpariwisata (X₁), pendidikan (X₂), dan UMK (X₃) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) di Provinsi Bali. Lokasi ini dipilih karena Provinsi Bali memiliki kontribusi sektor pariwisata yang sangat besar terhadap PDRB, sehingga pondasi pertumbuhan ekonominya rentan mengalami kontraksi akibat ancaman eksternal. Pada masa pascapandemi Covid-19 pemerintah fokus untuk pemulihan dan percepatan ekonomi pada sektor pariwisata, namun ternyata menimbulkan persoalan yaitu menurunnya tingkat partisipasi angkatan yang bekerja di beberapa sektor potensial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 90 observasi, yang terdiri 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (*cross section*) dalam rentang waktu 2015-2024 (10 tahun). Variabel terikat penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini menggunakan indikator penduduk usia kerja (PUK) di sektor basis nonpariwisata di kabupaten/kota Provinsi Bali. Sektor basis nonpariwisata tersebut merupakan hasil dari perhitungan DLQ tahun 2015-2024 di kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan mengabaikan sektor penyedia akomodasi, makan dan minum dalam analisis. Satuan variabel yang dinyatakan dalam bentuk jiwa. Variabel bebas Sektor basis nonpariwisata yang digunakan dalam

Pengaruh Sektor Basis Nonpariwisata, Pendidikan dan UMK terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali,

Seli Indah Dela Puspitasari & I Wayan Priyana Agus Sudharma

penelitian ini merupakan hasil dari perhitungan DLQ tahun 2015-2024 di kabupaten/kota di Provinsi Bali, yaitu sektor basis kecuali sektor penyedia akomodasi, makan dan minum. Sektor basis nonpariwisata tersebut diukur berdasarkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha dari tahun 2015-2024 di kabupaten/kota Provinsi Bali. Satuan variabel ini adalah miliar Rupiah. Pendidikan dalam penelitian diukur menggunakan data rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Satuan variabel digunakan dalam satuan tahun. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok, di mana termasuk tunjangan tetap menggunakan satuan juta Rupiah. Teknik analisis yang digunakan adalah model persamaan estimasi data panel, yang kemudian dilanjutkan dengan Uji Asumsi Klasik. Estimasi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh sektor basis nonpariwisata, pendidikan, dan UMK terhadap variabel penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, berikut merupakan model persamaan estimasi data panel jika lebih dari dua periode waktu (Wooldridge, 2020:447):

$$\ln(Y_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(X_{it1}) + \beta_2 \ln(X_{it2}) + \beta_3 \ln(X_{it3}) + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- $\ln(Y_{it})$ = Logaritma natural dari penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota i pada tahun t (Ribuan)
 t = Tahun yang diteliti 2015-2024
 i = Kabupaten/kota di Provinsi Bali
 β_0 = *Intercept*
 $\beta_{1, 2, 3}$ = Koefisien regresi masing-masing variabel
 $\ln X_1$ = Logaritma natural dari sektor basis nonpariwisata di kabupaten/kota i pada tahun t (miliar Rupiah)
 $\ln X_2$ = Logaritma natural dari pendidikan di kabupaten/kota i pada tahun t (tahun)
 $\ln X_3$ = Logaritma natural dari UMK di kabupaten/kota i pada tahun t (juta rupiah)
 e = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang unik, yang menjadi dasar variasi sektor ekonomi di berbagai wilayah. Menurut teori yang dikemukakan oleh Richardson, pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh permintaan barang dan jasa dari luar daerah tersebut. Teori Ekonomi Basis menjelaskan bahwa faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar wilayah tersebut. Pertumbuhan industri yang memanfaatkan sumber daya lokal, seperti tenaga kerja dan bahan baku, untuk dipasarkan ke luar daerah akan menciptakan kekayaan bagi daerah tersebut sekaligus membuka peluang kerja (Arsyad, 2016:357). Masuknya arus pendapatan dari luar daerah ini mendorong peningkatan konsumsi dan investasi di wilayah tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja. Analisis DLQ dalam penelitian ini mengecualikan sektor pariwisata, khususnya penyedia akomodasi, dan makan minum. Hal ini dilakukan agar analisis sektor basis nonpariwisata lebih jelas dan terfokus pada sektor lain yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi. Berdasarkan hasil analisis DLQ, terdapat empat (4) sektor basis nonpariwisata yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Menurut Kuncoro (2014:327) terdapat kriteria yang bisa dilihat dari perhitungan DLQ dalam penelitian ini, yaitu: 1) $DLQ > 1$, Sektor i masih dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang, 2) $DLQ \leq 1$, Sektor i tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa yang akan datang.

Hasil analisis DLQ 2015-2024 di kabupaten/kota Provinsi Bali mengidentifikasi bahwa terdapat empat sektor basis nonpariwisata yang ada di seluruh wilayah tersebut, yaitu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan; sektor industri pengolahan; sektor transportasi dan pergudangan; serta sektor informasi dan komunikasi. Temuan ini dapat dijadikan dasar untuk menganalisis pengaruh sektor basis nonpariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Dalam melihat pengaruh antara

variabel bebas yaitu, sektor basis nonpariwisata, pendidikan dan UMK terhadap variabel terikat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali model terbaik dalam analisis adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 1.
Hasil Regresi *Common Effect Model* (CEM)

Source	SS	Df	MS	Number of obs	=	90
				F(6, 83)	=	14,85
Model	14,339	6	2,389	Prob > F	=	0,000
Residual	13,361	83	,160	R-squared	=	0,517
				Adj R-squared	=	0,482
Total	27,700	89	,311	Root MSE	=	,401
lnY	Coef.	Std. Err.	z	P>z	[95 persen Conf.	Interval]
lnX1_1	,604	,161	3,75	0,000	,283	,925
lnX1_2	,851	,168	5,05	0,000	,516	1,186
lnX1_3	,064	,044	1,45	0,150	-,023	,151
lnX1_4	-,478	,197	-2,42	0,018	-,871	-,084
lnX2	-1,329	,484	-2,75	0,007	-2,291	-,366
lnX3	,224	,287	0,78	0,438	-,348	,797
_cons	3,663	4,154	0,88	0,380	-4,599	11,927

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 1. maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = 3,663 + 0,604 \ln X1_1it + 0,851 \ln X1_2it + 0,0648 \ln X1_3it - 0,478 \ln X1_4it - 1,329 \ln X2it + 0,224 \ln X3it + e_{it}$$

Keterangan:

- lnY : Logaritma natural penyerapan tenaga kerja
lnX1_1 : Logaritma natural sektor pertanian, perikanan, kehutanan
lnX1_2 : Logaritma natural sektor industri pengolahan
lnX1_3 : Logaritma natural sektor transportasi dan pergudangan
lnX1_4 : Logaritma natural sektor informasi dan komunikasi
lnX2 : Logaritma natural pendidikan
lnX3 : Logaritma natural Upah Minimum Kabupaten/kota
e : error
i : 1,2,3,...9 cross section (kabupaten/kota di Provinsi Bali)
t : 1,2,3,...10 time series (tahun)

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan regresi data panel memberikan hasil pendugaan yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE). Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian.

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

Shapiro-Wilk W test for normal data					
Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
residual	90	0,989	0,476	-1,575	0,942

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai koefisien Prob > Z, yaitu $0,94236 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas mengevaluasi hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinearitas.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

	lnX1_1	lnX1_2	lnX1_3	lnX1_4	IX2	IX3
lnX1_1	1,000					
lnX1_2	0,503	1,000				
lnX1_3	0,296	0,199	1,000			
lnX1_4	0,611	0,871	0,501	1,000		
lnX2	0,137	0,746	0,302	0,761	1,000	
lnX3	0,129	0,279	0,201	0,407	0,469	1,000

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel independen memiliki nilai koefisien $< 0,90$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity</i>	
<i>Ho: Constant variance</i>	
<i>Variables: fitted values of lnY</i>	
chi2(1)	= 2,34
Prob > chi2	= 0,125

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien Prob > Chi2, yaitu $0,1258 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Adanya korelasi ini mengindikasikan bahwa nilai residual tidak bersifat acak, melainkan saling terkait antar waktu, yang dikenal sebagai masalah autokorelasi.

Tabel 5.
Hasil Uji Autokorelasi

<i>Wooldridge test for autocorrelation in panel data</i>	
<i>H0: no first-order autocorrelation</i>	
F1, 8)	= 1,236
Prob > F	= 0,298

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien Prob > F, yaitu $0,2985 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah autokorelasi.

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang terhadap variabel dependen. Pengujian ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian model persamaan yang digunakan.

Tabel 6.
Hasil Uji Simultan (Uji F)

F (6, 83)	=	14,85
Prob > F	=	0,000

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan perhitungan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ sebesar $14,85 > 2,21$ dengan nilai Prob. (signifikansi) $0,0000 < 0,05$, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen variabel sektor pertanian, perikanan, kehutanan (X_{1_1}), variabel sektor industri pengolahan (X_{1_2}), variabel sektor transportasi dan pergudangan (X_{1_3}), variabel sektor informasi dan komunikasi (X_{1_4}), pendidikan (X_2), Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) di Provinsi Bali.

Tabel 7.
Hasil Parsial (Uji t)

lnY	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95 persen Conf.	Interval]
lnX _{1_1}	,604	,161	3,75	0,000	,283	,925
lnX _{1_2}	,851	,168	5,05	0,000	,516	1,186
lnX _{1_3}	,064	,044	1,45	0,150	-,023	,151
lnX _{1_4}	-,478	,197	-2,42	0,018	-,871	-,084
lnX ₂	-1,329	,484	-2,75	0,007	-2,291	-,366
lnY	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95 persen Conf.	Interval]
lnX ₃	,224	,287	0,78	0,438	-,348	,797
cons	3,663	4,154	0,88	0,380	-4,599	11,927

Sumber: Data Diolah, 2025

Uji parsial sektor pertanian, perikanan dan kehutanan (X_{1_1}) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y), menunjukkan bahwa $t_{\text{statistik}}$ sebesar $3,75 > t_{\text{tabel}}$ 1,99 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka sehingga disimpulkan bahwa secara parsial sektor pertanian, perikanan dan kehutanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Hasil regresi menunjukkan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

Tabel 8.
Rata-Rata Nilai DLQ Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten/kota di Provinsi Bali, Tahun 2015-2024

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata DLQ	Nilai Komoditas Unggulan
1	Denpasar	1,04	Subsektor perikanan yaitu Ikan Tuna
2	Klungkung	1,02	Subsektor perikanan yaitu rumput laut
3	Jembrana	1,01	Subsektor perikanan, yaitu ikan tangkap seperti lemuru. Subsektor pertanian kategori tanaman perkebunan, yaitu Kakao (<i>Theobroma cacao</i>).
4	Karangasem	1,01	Subsektor pertanian kategori tanaman hortikultura, yaitu buah salak. Subsektor perkebunan yaitu pohon lontar

5	Badung	1,01	Subsektor pertanian kategori tanaman hortikultura, yaitu buah melon, nangka
6	Buleleng	1,01	Subsektor pertanian kategori tanaman hortikultura, yaitu buah durian dan sayuran. Subsektor pertanian kategori tanaman perkebunan, yaitu cengkeh. Subsektor peternakan, yaitu Kambing.
7	Gianyar	1,01	Subsektor pertanian kategori tanaman pangan, yaitu padi (terbesar ke 2 setelah tabanan)
8	Bangli	1,01	Subsektor pertanian kategori tanaman hortikultura, yaitu bawang merah, wortel. Subsektor pertanian kategori tanaman perkebunan, yaitu kopi arabika, dan buah jeruk. Subsektor peternakan, yaitu Babi.
9	Tabanan	1,01	Subsektor pertanian kategori tanaman pangan, yaitu padi (terbesar di Bali)

Sumber: Data Diolah, 2025

Temuan ini selaras dengan Hukum Okun, yang menyatakan bahwa peningkatan output ekonomi yang melampaui pertumbuhan potensial akan menurunkan tingkat pengangguran karena aktivitas ekonomi yang meningkat menciptakan lebih banyak permintaan tenaga kerja. Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan secara nyata mampu mendorong penyerapan tenaga kerja, khususnya di wilayah yang memiliki keunggulan komparatif pada sektor tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan Keynesian yang menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai penggerak output dan lapangan kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Melati & Idris (2023) bahwa ketika terjadi peningkatan PDRB sektor pertanian maka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Sektor pertanian perikanan dan kehutanan dibagi menjadi 3 (tiga) subsektor, yaitu subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, subsektor perikanan, serta subsektor kehutanan dan pennebangan kayu. Subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian di Provinsi Bali merupakan subkategori dengan nilai tambah paling besar. Subsektor tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan.

Tabel 8 mencatat rata-rata nilai DLQ tertinggi untuk sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan selama periode 2015–2024, yakni Kota Denpasar sebesar 1,04 dan 1,02 di Kabupaten Klungkung. Nilai DLQ yang tinggi bukan berarti Denpasar unggul dalam nilai produksi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan DLQ mampu menangkap keunggulan struktural yang tidak selalu tercermin dari nilai absolut kontribusi sektoral, tetapi justru dari stabilitas dan proporsi relatif sektor tersebut dalam jangka panjang. Kota Denpasar menunjukkan keunggulan dalam subsektor perikanan, khususnya melalui aktivitas ekspor ikan tuna yang terpusat di Pelabuhan Benoa. Meskipun Denpasar bukan daerah tangkapan utama, keberadaan pelabuhan ini sebagai simpul logistik dan ekspor menjadikan perannya strategis secara nasional. Aktivitas ekspor oleh perusahaan seperti PT Hatindo Makmur dan PT Sari Segar Laut Indonesia menciptakan nilai tambah melalui pengolahan, distribusi, serta dukungan terhadap sektor logistik dan tenaga kerja. Pemerintah Kota Denpasar turut memperkuat posisi ini dengan kebijakan efisiensi ekspor, pengembangan infrastruktur pelabuhan, dan perlindungan tenaga kerja. Namun, potensi konflik ruang dengan sektor pariwisata di Pelabuhan Benoa mendorong perlunya pengembangan pelabuhan khusus tuna untuk mendukung efisiensi rantai pasok dan penguatan industri ekspor. Meski sektor perikanan mencatat produktivitas tinggi, penyerapan tenaga kerja bersifat fluktuatif, dengan lonjakan pasca pandemi tahun 2021 dan penurunan drastis tahun 2022 karena kembalinya tenaga kerja ke sektor pariwisata. Fenomena ini mencerminkan efisiensi dan mekanisasi

sektor, sekaligus menuntut kebijakan yang berfokus pada inklusi tenaga kerja melalui penguatan aktivitas hulu dan hilir.

Kabupaten Klungkung dengan nilai DLQ tertinggi kedua menunjukkan kekuatan sektor perikanan melalui budidaya rumput laut di wilayah Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Komoditas seperti *Eucheuma spinosum* dan *Eucheuma cottonii* menjadi andalan ekspor dan didukung oleh kemitraan koperasi-industri dengan perusahaan pengolah seperti PT Indonusa Algaemas Prima. Kemitraan ini memperkuat posisi tawar petani, menjamin akses pasar, dan mendorong pengembangan industri hilir. Dukungan Pemkab Klungkung melalui pembentukan Kampung Budidaya Rumput Laut, proyek demplot, dan insentif fiskal bagi koperasi desa menjadi faktor pendukung pertumbuhan sektor ini. Meski pertumbuhan PDRB dan tenaga kerja di sektor ini bersifat fluktuatif, pola budidaya rumput laut tetap memiliki potensi sebagai sektor padat karya dengan penggunaan teknologi sederhana yang menunjang efisiensi tanpa mengurangi peran tenaga kerja. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata telah mendorong alih fungsi sebagian besar kawasan pesisir, terutama pantai-pantai yang memiliki nilai jual tinggi sebagai objek wisata. Akibatnya, ruang untuk budidaya rumput laut kian menyempit, sehingga berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi petani lokal. Pemerintah perlu menyusun kebijakan zonasi pesisir yang lebih inklusif dengan mengalokasikan kawasan pantai nonpariwisata sebagai zona prioritas budidaya rumput laut. Pantai-pantai yang secara potensi visual kurang menarik sebagai destinasi wisata dapat dialihkan fungsinya menjadi kawasan budidaya rumput laut (Nuryartono *et al.*, 2021). Langkah ini bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan budidaya rumput laut, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dalam aktivitas petani rumput laut.

Uji parsial sektor industri pengolahan (X_{1_2}) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y), menunjukkan bahwa $t_{statistik}$ sebesar $5,05 > t_{tabel}$ 1,99 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa secara parsial sektor industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Hasil regresi menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Peningkatan hasil produksi melalui PDRB akan memerlukan tenaga kerja tambahan sehingga mampu menyerap tenaga kerja terdidik dan mengurangi pengangguran terdidik. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan sektor industri yang tinggi akan mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 9.
Rata-Rata Nilai DLQ Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/kota di Provinsi Bali, Tahun 2015-2024

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Nilai DLQ	Komoditas Unggulan
1	Jembrana	1,05	Industri makanan, yaitu produk ikan kaleng, seperti Sarden Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, yaitu yaitu produk triplek setengah jadi, usuk, balok, furniture
2	Bangli	1,02	Industri makan dan minum, yaitu bubuk kopi arabika kintamani
3	Karangasem	1,02	Industri tekstil dan pakaian jadi, yaitu kain Endek Industri makan dan minum, yaitu pengolahan Arak Bali
4	Klungkung	1,01	Industri makan dan minum, yaitu olahan rumput laut seperti rumput laut
5	Tabanan	1,01	Industri barang galian bukan logam yaitu kerajinan keramik
6	Buleleng	1,01	Industri makan dan minum, seperti UMKM kuliner
7	Denpasar	1,01	Industri makan dan minum, seperti UMKM kuliner
8	Badung	1,01	Industri makan dan minum seperti, olahan hasil laut dan UMKM kuliner
9	Gianyar	1,01	Industri barang galian bukan logam, yaitu kerajinan perak

Sumber: Data Diolah, 2025

Sektor industri pengolahan dibagi menjadi 16 subsektor, di antaranya dengan kontribusi terbesar ada 5 (lima) subsektor yang ada di Provinsi Bali, yaitu industri makanan dan minuman; industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri tekstil dan pakaian jadi; industri furnitur; industri barang galian bukan logam. Rata-rata nilai *Dynamic Location Quotient* (DLQ) sektor industri pengolahan di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2015–2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Jembrana mencatat nilai tertinggi sebesar 1,05, menandakan sektor ini sebagai sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif. Kontribusi signifikan sektor ini tercermin dari dominasi industri makanan, khususnya pengalengan ikan lemuru di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Keberadaan PT Sarana Tani Pratama sebagai industri berskala besar yang telah memenuhi standar HACCP memperkuat daya saing ekspor. Relokasi aktivitas perikanan nontuna dari Pelabuhan Benoa ke PPN Pengambangan menjadi strategi sinergis yang memperkuat spesialisasi wilayah. Selain itu, industri kayu dan furnitur di Jembrana juga berkembang meskipun menghadapi tantangan pasokan bahan baku dan keterbatasan pembiayaan. Kolaborasi antardaerah dengan Buleleng dan Tabanan sebagai penyedia kayu, serta fasilitasi SVLK, menjadi solusi potensial untuk mendukung ekspor produk kayu. Fluktuasi penyerapan tenaga kerja di sektor ini dipengaruhi oleh dinamika pasokan, pandemi, dan akses pasar. Namun, lonjakan tenaga kerja pada tahun 2020 dan 2023 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi tumpuan pemulihan ekonomi daerah. Strategi diversifikasi seperti pengolahan limbah ikan, UMKM berbasis laut, dan ekowisata perikanan juga dapat memperluas basis ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Bangli menempati posisi kedua dengan nilai DLQ sebesar 1,02 yang didorong oleh industri pengolahan kopi Arabika Kintamani. Produk ini telah menembus pasar ekspor melalui skema kopi spesialti dan dilindungi indikasi geografis Kopi Arabika Kintamani Bali, yang memberikan nilai tambah pada reputasi global. Pemerintah daerah aktif mendorong hilirisasi melalui pelatihan, fasilitasi sertifikasi, hingga promosi internasional. Meski pertumbuhan PDRB relatif stabil, penyerapan tenaga kerja di sektor ini menunjukkan fluktuasi tajam, terutama akibat dampak pandemi dan tekanan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku dan ketidakpastian politik. Salah satu langkah fundamental adalah pembangunan sarana *roasting* kolektif di sentra produksi Kintamani. Fasilitas ini harus berstandar ekspor, dilengkapi dengan mesin roaster modern, fasilitas pengemasan higienis, dan area penyimpanan yang terkontrol. Selanjutnya, pelatihan digital ekspor bagi pelaku usaha kopi Kintamani harus dirancang komprehensif, tidak sekadar mengajarkan teknis ekspor. Program ini perlu berfokus pada transformasi digital dalam seluruh aspek pemasaran dan penjualan internasional.

Kabupaten Karangasem memiliki potensi sektor industri pengolahan yang ditopang oleh dua komoditas unggulan, yakni arak Bali dan kain tenun tradisional. Rata-rata nilai DLQ sektor ini selama 2015–2024 mencapai 1,02, menandakan keunggulan komparatif di tingkat regional. Sentra produksi arak tradisional di Desa Tri Eka Buana telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi signifikan pasca implementasi Pergub Bali No. 1 Tahun 2020, meski produksi masih terpengaruh musim dan dominasi arak gula di pasar. Strategi hilirisasi melalui pembangunan fasilitas penyulingan modern, klasifikasi produk premium, dan penguatan narasi budaya diharapkan mampu menembus pasar ekspor, didukung oleh promosi melalui festival, pameran internasional untuk membangun kontak langsung dengan pembeli.

Sementara itu, sektor tenun Karangasem juga berkembang pesat dengan produk unggulan seperti kain gringsing Tenganan yang berstatus indikasi geografis dan endek yang didorong oleh kebijakan penggunaan busana adat. Meski distribusi produk masih terkonsentrasi di Gianyar, strategi pemberdayaan melalui digitalisasi, branding kolektif, festival tenun, serta pembentukan pusat pemasaran lokal menjadi langkah penting untuk memperluas akses pasar. Perluasan promosi dan akses pasar, perlu dilakukan pembangunan pusat pemasaran terpadu di Karangasem yang dikelola kolektif oleh komunitas perajin. Digitalisasi kolektif harus diwujudkan dengan membangun platform daring khusus yang mempromosikan dan menjual produk tenun Karangasem secara langsung dari desa, memutus mata rantai perantara. Penguatan sektor tenun Karangasem menjanjikan potensi penyerapan

tenaga kerja baru yang substansial, khususnya pada sektor hilir dan pendukung. Di hulu, perajin tenun yang sudah ada akan mengalami peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan berkat perluasan pasar. Sementara itu, di hilir dan sektor pendukung, peluang kerja baru akan sangat beragam. Desainer fesyen dan aksesoris akan dibutuhkan untuk mengolah kain tenun menjadi produk jadi seperti pakaian siap pakai, tas, atau scarf. Penjahit dan penata busana juga akan memperoleh lebih banyak pekerjaan untuk produk-produk turunan tersebut. Peran tenaga pemasaran digital dan *e-commerce specialist*, terutama dari kalangan muda, sangat krusial untuk mengelola *platform* penjualan daring dan *branding* produk. Fotografer dan *content creator* akan dibutuhkan untuk menghasilkan visual produk yang menarik. Selain itu, pemandu agrowisata/wisata tenun di desa sentra produksi akan membuka peluang wisata edukasi. Terakhir, staf administrasi dan manajemen diperlukan untuk koperasi perajin.

Uji parsial sektor transportasi dan perdagangan ($X_{1.3}$) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y), menunjukkan bahwa $t_{\text{statistik}}$ sebesar $1,45 < t_{\text{tabel}} 1,99$ dan signifikansi $0,150 > 0,05$, sehingga menunjukkan secara parsial sektor transportasi dan perdagangan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil regresi sektor transportasi dan pergudangan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini disebabkan, pertama perkembangan sektor transportasi dan pergudangan di Bali masih terpusat di beberapa wilayah tertentu. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Keynesian bahwa permintaan agregat merupakan kunci utama penciptaan lapangan kerja. Sektor transportasi sebagai penunjang utama kegiatan ekonomi dan pariwisata seharusnya mampu mendorong penciptaan tenaga kerja apabila ada permintaan yang cukup kuat dari sektor lain. Pertama, Masuknya tenaga kerja dari luar daerah melalui platform transportasi daring (ojek online) seperti Gojek dan Grab, berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Sebagaimana dijelaskan oleh Adiyadnya & Suwandewi (2024), pertumbuhan ekonomi Bali pascapandemi Covid-19 cenderung mengalami pergeseran struktur tenaga kerja ke arah sektor informal dan berbasis platform digital, yang sering kali tidak tercatat secara resmi dalam statistik ketenagakerjaan daerah. Hal ini menyebabkan sektor transportasi memang tumbuh, tetapi tidak mencerminkan peningkatan tenaga kerja lokal secara signifikan. Sektor transportasi dan pergudangan di Provinsi Bali terdapat lima subkategori, yaitu angkutan darat; angkutan laut, angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), angkutan udara, serta pergudangan, jasa penunjang angkutan, pos, dan kurir.

Tabel 10.
Rata-Rata Nilai DLQ Sektor Transportasi dan Pergudangan Kabupaten/kota di Provinsi Bali, Tahun 2015-2024

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Nilai DLQ	Infrastruktur Unggulan
1	Bangli	2,65	Jasa angkutan/ekspedisi logistik pertanian, yaitu (truk atau mobil box), dan angkutan pendukung pariwisata
2	Karangasem	2,36	Angkutan Laut dan ASDP, yaitu Pelabuhan Padangbai, Pelabuhan Tanah Ampo, Pelabuhan Amuk
3	Buleleng	2,03	Angkutan Laut, yaitu Pelabuhan Celukan Bawang
4	Tabanan	2,01	Angkutan Darat, yaitu angkutan umum
5	Jembrana	1,96	1. Angkutan Laut dan ASDP, yaitu, Pelabuhan Gilimanuk 2. Pergudangan: Gudang transit otomotif di Klatakan, Melaya
6	Gianyar	1,62	Angkutan Darat, yaitu angkutan pendukung pariwisata
7	Badung	1,39	1. Angkutan udara yaitu, Bandara I Gusti Ngurah Rai 2. Jasa penunjang Angkutan, yaitu PT. Tol Bali Mandara
8	Denpasar	1,39	1. Angkutan Laut, yaitu Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Sanur 2. Angkutan Darat, yaitu Trans Sarbagita
9	Klungkung	1,35	Angkutan Laut dan ASDP, yaitu Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan dan Pelabuhan Sampalan di Pulau Nusa Gede

Sumber: Data Diolah, 2025

Uji parsial sektor informasi dan komunikasi ($X_{1.4}$) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y), menunjukkan bahwa $t_{statistik}$ sebesar $-2,42$, sehingga $|t_{statistik}| = 2,42 > t_{tabel} 1,99$ dan nilai signifikan $0,018 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa secara parsial sektor informasi dan komunikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil regresi sektor informasi dan komunikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Pengaruh tersebut didukung oleh teori efisiensi teknologi, yang menekankan bahwa pertumbuhan output ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi, bukan dengan penambahan jumlah tenaga kerja. Hasil regresi ini sejalan dengan penelitian Nisa & Galuh (2024) bahwa sektor informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan cenderung negatif. Sektor informasi dan komunikasi mencakup berbagai subsektor seperti telekomunikasi, pemrograman, konsultasi teknologi informasi, penerbitan, produksi video dan musik, serta penyiaran radio dan televisi.

Tabel 11.
Nilai DLQ Sektor Informasi dan Komunikasi Kabupaten /kota di Provinsi Bali, Tahun 2015-2024

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Nilai DLQ	Infrastruktur
1	Jembrana	1,013	Sentral Telepon Otomatis (STO)
2	Gianyar	1,011	Pusat rumah produksi film dokumenter dan musik kontemplatif.
3	Karangasem	1,010	Perluasan BTS
4	Badung	1,008	<i>Backbone fiber optic Moratelindo</i>
5	Klungkung	1,008	Pembangunan BTS
6	Bangli	1,007	Perluasan BTS
7	Tabanan	1,006	Jaringan FO antar-OPD
8	Buleleng	1,006	Radio lokal aktif Penyiaran: Kantor TVRI Bali, RRI Denpasar, stasiun radio swasta aktif
9	Denpasar	1,006	Produksi Video & Musik: Studio musik indie, agensi kreatif, dan rumah produksi video profesional; Penerbitan: Pusat koran, tabloid, dan media daring lokal Bali

Sumber: Data Diolah, 2025

Sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Jembrana menunjukkan kinerja unggulan dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Hal ini tercermin dari nilai *Dynamic Location Quotient* (DLQ) yang tertinggi, yakni sebesar 1,013 selama periode 2015–2024. Pertumbuhan sektor ini ditopang oleh pembangunan infrastruktur jaringan digital yang signifikan, termasuk keberadaan Sentral Telepon Otomatis (STO) di wilayah Negara dan Gilimanuk, serta pemasangan jaringan kabel serat optik di berbagai lokasi strategis. STO di Jembrana memegang peranan penting sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah, tidak hanya dalam melayani telekomunikasi dasar tetapi juga dalam menopang akses internet dan data. Posisi geografis Jembrana sebagai pintu masuk utama Bali dari Pulau Jawa menjadikan pembangunan STO di wilayah ini sebagai keputusan strategis untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital.

Kabupaten Gianyar menempati posisi kedua dalam nilai rata-rata DLQ sektor informasi dan komunikasi selama tahun 2015–2024, mencerminkan percepatan adopsi teknologi digital dan perkembangan infrastruktur yang merata. Jaringan fiber optik telah menjangkau hingga ke wilayah desa wisata seperti Ubud, Tegallalang, dan Sukawati, memberikan akses internet yang cepat dan stabil. Kondisi ini mendorong tumbuhnya industri kreatif digital, termasuk rumah produksi konten, studio musik kontemplatif, dan pelaku usaha daring seperti *e-commerce* seni, edukasi virtual, dan pariwisata

digital. Selain itu, keberadaan komunitas ekspatriat dan pekerja lepas internasional turut meningkatkan permintaan terhadap layanan digital seperti ruang kerja bersama dan konsultasi teknologi informasi. Integrasi budaya lokal yang terbuka terhadap inovasi menjadikan Gianyar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital di Bali, dengan peran teknologi tidak hanya pada konsumsi, tetapi juga pada produksi konten digital, pemasaran daring, dan layanan profesional berbasis internet.

Sementara itu, Kabupaten Karangasem menunjukkan kemajuan signifikan dalam sektor informasi dan komunikasi, sebagaimana tercermin dalam tren kenaikan nilai DLQ selama periode penelitian. Pemerintah daerah secara aktif mendorong pemerataan akses digital melalui alokasi anggaran untuk pemasangan WiFi gratis di sekolah-sekolah, terutama SD dan SMP di daerah pelosok. Kebijakan ini bertujuan mendukung sistem pembelajaran berbasis digital dan memperluas akses internet bagi masyarakat. Selain itu, ekspansi penyedia layanan internet seperti Biznet yang memperluas jaringan fiber optik di wilayah Karangasem turut mempercepat proses digitalisasi. Perbaikan infrastruktur ini membuka peluang pertumbuhan ekonomi berbasis digital, terutama dalam bidang pendidikan, perdagangan daring, dan layanan informasi publik, serta menunjukkan bahwa digitalisasi dapat berkembang secara inklusif bahkan di wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau teknologi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{\text{statistik}}$ sebesar $-2,75$, sehingga $|t_{\text{statistik}}| = 2,75 > t_{\text{tabel}} 1,99$ dan nilai signifikan $0,007 < 0,05$, menunjukkan variabel pendidikan (X_2) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dinata & Asmara (2024) bahwa peningkatan tingkat pendidikan cenderung memperketat kompetisi dalam mengakses peluang kerja yang jumlahnya terbatas. Adanya Pandemi Covid-19 lulusan pendidikan terutama pendidikan tinggi menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam memperebutkan lapangan pekerjaan yang semakin terbatas. Hal ini menyebabkan pasar kerja menyusut secara drastis, sementara jumlah penduduk usia kerja, termasuk mereka yang baru lulus dari institusi pendidikan, terus bertambah. Adanya *skill mismatch* antara keterampilan yang diperoleh di bangku pendidikan dan kebutuhan praktis dunia kerja Bali semakin memperburuk situasi. Banyak lulusan tidak siap terjun ke sektor informal atau tidak memiliki keterampilan fleksibel yang dibutuhkan pada masa krisis. Skema pelatihan dapat dirancang dalam bentuk beasiswa vokasional, pelatihan intensif gratis, hingga program magang industri yang mempertemukan lulusan dengan dunia kerja secara langsung. Upaya ini diharapkan mampu memperkecil jurang antara dunia pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja nyata, sehingga pendidikan tidak lagi menjadi faktor yang menurunkan penyerapan tenaga kerja, melainkan justru memperkuatnya.

Uji parsial UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali menunjukkan hasil $t_{\text{statistik}}$ sebesar $0,78 < t_{\text{tabel}} 1,99$ dan nilai signifikan $0,438 > 0,05$, maka disimpulkan variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_3) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Cengiz *et al.* (2019) bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar sektor ekonomi di Bali masih didominasi oleh sektor informal, sebagian besar pekerjaan utama yaitu, tenaga produksi, pekerja kasar, tenaga usaha penjualan, dan tenaga usaha pertanian dan perikanan. Kemudian terdapat banyak pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan struktur gaji dengan UMK. Langkah lanjutan yang dibutuhkan berupa pemberian insentif kepada UMKM yang bergerak di sektor padat karya agar mampu menaikkan upah tanpa membebani operasional mereka secara berlebihan. Pemerintah juga dapat merancang skema subsidi gaji atau bantuan sosial bersyarat, seperti subsidi upah bagi pekerja dengan penghasilan di bawah UMK, atau insentif fiskal bagi perusahaan yang konsisten menerapkan sistem pengupahan yang layak.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini adalah terdapat empat sektor basis nonpariwisata yaitu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan; sektor industri pengolahan; sektor transportasi dan pergudangan; sektor informasi dan komunikasi. Secara simultan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan; sektor industri pengolahan; sektor transportasi dan pergudangan; sektor informasi dan komunikasi, pendidikan, dan UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali Tahun 2015-2024. Secara parsial sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan (X_{1_1}); sektor industri pengolahan (X_{1_2}) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, variabel sektor informasi dan komunikasi (X_{1_4}), pendidikan (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, dan sektor transportasi dan pergudangan (X_{1_3}), UMK (X_3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Adapun saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 12.
Saran Penelitian

No	Sektor	Isu	Rekomendasi	Lokasi	Pelaksana
1	Sektor Perikanan (Ikan Tuna)	Adanya kebijakan penataan ruang Pelabuhan Benoa, aktivitas perikanan nontuna direncanakan akan direlokasi ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan di Jembrana	Penambahan pelabuhan khusus pendaratan ikan tuna yang masih memiliki potensi lahan dan kedekatan geografis dengan pusat produksi tuna nasional, namun tetap terhubung dengan infrastruktur transportasi domestik dan internasional	Pelabuhan Benoa, di Denpasar	Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Denpasar
2	Sektor Perikanan (budidaya rumput laut)	1. Alih fungsi ruang pesisir akibat pariwisata 2. Ketergantungan pada industri besar 3. Rendahnya nilai tambah lokal	1. Penetapan zona budidaya rumput laut di pantai nonpariwisata 2. Pembentukan koperasi pengolah skala desa 3. Insentif fiskal koperasi & UMKM rumput laut	Desa Suana, Jungutbatu, Lembongan, Kutampi Kaler di Kabupaten Klungkung	Pemkab Klungkung, Dinas Kelautan & Perikanan, Bappeda, Koperasi Petani
3	Sektor industri pengolahan (Ikan nonTuna)	Adanya kebijakan penataan ruang Pelabuhan Benoa, aktivitas perikanan non-tuna direncanakan akan direlokasi ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan di Jembrana	Investasi terhadap industri pengolahan, pada subsektor makanan yaitu industri pengolahan ikan kaleng non tuna	Sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan di Jembrana	Pemkab Jembrana, pihak swasta

Lanjutan:

4	Sektor industri pengolahan kayu (Triplek, Furniture)	Pasokan kayu lokal yang bersifat musiman, menjadi tantangan ketersediaan bahan baku kayu	Kolaborasi antar-daerah penghasil kayu (sengon, jati, atau mahoni), seperti Buleleng atau Tabanan untuk menjamin kelangsungan pasokan bahan baku. Kedua kabupaten ini memiliki areal hutan produksi yang signifikan sehingga dapat menyuplai kayu melalui sistem perizinan yang legal.	Jembrana	Pemkab Jembrana, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pelaku Usaha Industri Kayu dan Furnitur
5	Sektor industri Pengolahan Kopi Arabika Kintamani	1. Sebagian besar biji kopi hanya dijual dalam bentuk mentah (<i>green bean</i>) tanpa nilai tambah maksimal dan kurangnya fasilitas produksi 2. Kualitas sumber daya manusia	1. Pembangunan sarana roasting kolektif di sentra produksi berstandar ekspor, dilengkapi dengan mesin roaster modern, fasilitas pengemasan higienis, dan area penyimpanan yang terkontrol 2. Pelatihan digital ekspor berfokus	Kintamani, Bangli	Pemkab Bangli, Pihak Swasta. pelaku usaha industri pengolahan Kopi Kintamani,
6	Sektor industri pengolahan minuman Arak Bali	1. Standarisasi Arak Bali kurangnya branding yang kuat dan akses pasar ekspor	1. Pembangunan fasilitas pengolahan dan roasting kolektif yang berstandar ekspor. 2. Membangun citra merek yang kuat	Desa Tri Eka Buana, Kabupaten Karangasem	Pemkab Klungkung, Dinas Kelautan & Perikanan, Bappeda, Koperasi Petani

Sumber: Data Diolah, 2025

REFERENSI

- Adiyadnya, M. S. P., & Suwandewi, P. A. M. (2024). pengaruh kondisi sosial dan ekonomi terhadap aspirasi kerja tenaga kerja Provinsi Bali pasca Pandemi Covid-19. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 7(1), 40–48. <https://doi.org/10.22225/wedj.7.1.2024.40-48>
- Ainun, A. N. A. A., Chakim, M. H. R., Kundhani, E. Y., & Hanum, N. (2023). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali (Orang), 2018-2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama (17 sektor) dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan (orang), 2018-2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2024c). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Provinsi Bali Tahun 2019-2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2024d). *Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa) dan Kepadatan Penduduk per (km²), Pertengahan Tahun 2024*.
- Bayu Windayana, I. B. A., & Darsana, I. B. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, UMK, investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(1), 57. <https://doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i01.p04>
- Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., & Zipperer, B. (2019). The effect of minimum wages on low-wage jobs. *The Quarterly Journal of Economics*, 134(3), 1405–1454. <https://doi.org/10.1093/qje/qjz014>
- Dinata, A. P., & Asmara, kiki. (2024). Analisis pengaruh PDRB sektor jasa, tingkat pendidikan dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa di Kota Surabaya. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 12–22.

- Hikmawati, S. N., & Yasa, I. N. M. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP, dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2411. <https://doi.org/10.24843/EEB.2024.v13.i11.p18>
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi daerah: Menuju era baru pembangunan daerah* (3rd ed.). Erlangga.
- Melati, T., & Idris. (2023). Analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 5(4), 1–8. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Nisa, K., & Galuh, A. K. (2024). Analisis sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(3), 847–860. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.3.15>
- Nuryartono, N., Waldron, S., Tarman, K., Pasaribu, S. H., Langford, A., Farid, M., & Sulfahri. (2021). *An Analysis of the South Sulawesi Seaweed Industry*.
- Parastika, T. O., & Setyowati, E. (2023). Analysis of labor absorption in East Kalimantan Province 2017–2021. *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(2), 247–253.
- Pratama, Y. A., & Hidayah, N. (2023). Determinan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan data panel periode 2010–2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 151. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.759>
- Pratiwi, I. A. M., Apsari Anandari, I. G. A. A., & Dyastari Saskara, I. A. G. (2023). Analisis sektor unggulan dan potensi ekonomi di Provinsi Bali pascapandemi Covid-19. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(05), 924. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i05.p13>
- Pratiwi, N. P. M., & Purwanti, P. A. P. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, 13(3), 273–286.
- Purwahita, A. A. A. R. M., Wardhana, P. B. W., Ardiasa, I. K., & I Made Winia. (2021). Dampak Covid-19 terhadap pariwisata Bali ditinjau dari sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan (sebuah tinjauan pustaka). *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 68–80. <https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i2.29>
- Rahmita, F., Purwaningsih, S., Andriawan, & Fauzana, R. (2022). The effect of education level and labor absorption on unemployment in Indonesia. *Science, Economics and Technology (AICMEST)*, 1–10.
- Rotar, L. J., Gricar, S., & Bojnec, S. (2023). The relationship between tourism and employment: Evidence from the Alps-Adriatic country. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(1). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2080737>
- Sagita, E. A. N., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2024). Analisis hubungan sektor ekonomi basis dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(6), 2107–2112. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1208>
- Sakdiyah, H., & Taufiq, M. (2023). Analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Kabupaten Lamongan. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(2), 55–66. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20163>
- Siatan, M. S., & Zuliansyah, A. (2023). Economic growth on labor absorption: District/city panel data analysis in Lampung Province. *International Journal of Professional: Business Review*, 8(7), 1–20.
- Sudharma, I. W. P. A. (2023). Studi kasus penilaian hotel di Bali. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 209–216. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.920>
- Sukirno, S. (2014). *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)* (2nd ed.). Kencana.
- Weir-Smith, G., & Dlamini, S. (2024). Hit the road: Spatial characteristics of labor absorption in South Africa. *The Professional Geographer*, 76(3), 331–342. <https://doi.org/10.1080/00330124.2023.2300801>
- Wooldridge, J. M. . (2020). *Introductory econometrics : A modern approach* (7th ed.). Cengage.